



# HIDUP DENGAN BENCANA PARIWISATA GUNUNG BERBASIS MASYARAKAT DI YOGYAKARTA 1925 -2020

Fajar Sulistya<sup>1\*</sup>, Pujo Semedi<sup>1</sup>, M. Yusuf<sup>1</sup>, Agung Wicaksono<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

\*Corresponding author: fajar.sulistya1087@mail.ugm.ac.id

**Abstract** Secara statistik, obyek pariwisata kaliurang menyedot ratusan ribu pengunjung tiap tahunnya sehingga menjadi salah satu *community-based tourism (CBT)* atau pariwisata berbasis masyarakat yang paling berhasil di Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan telaah historis, berkembangnya CBT di kaliurang bukanlah suatu hal yang hadir secara tiba-tiba, namun merupakan implikasi dari resiliensi menyejarah masyarakat yang awalnya tinggal di Kawasan marjinal dan rawan bencana. Pada awalnya, mereka merupakan hamba orang kaya pemilik villa yang secara perlahan bertransformasi menjadi pegiat pariwisata yang mandiri. Proses ini tidaklah mudah karena upaya membangun pariwisata berhadapan dengan erupsi Gunung Merapi yang, meski tak terprediksi, senantiasa berlangsung secara berulang. Pada 2020, wabah Covid-19 yang melumpuhkan ekonomi juga berdampak besar pada wisata Kaliurang. Lagi-lagi, kita melihat bagaimana resiliensi pelaku wisata Kaliurang mampu menghindarkan sector ini dari kebangkrutan sehingga secara perlahan bangkit Kembali. Secara historis, meski Kaliurang, dan pelaku wisatanya, menghadapi beragam tekanan social dan bencana dalam satu abad terakhir, fakta etnografis menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat yang resilien. Oleh karenanya, pertanyaan krusial yang dihadirkan dalam artikel ini adalah, relasi-relasi sosial ekonomi seperti apakah yang hidup di Kaliurang sehingga mereka tidak hanya mampu bertahan meski dihantam berbagai bencana, tetapi juga –pada beberapa kesempatan–, mengubahnya menjadi peluang usaha baru yang berkontribusi besar meningkatkan kondisi ekonomi?

## Keyword:

Bencana, resiliensi, CBT

## Article Info

Received : 04 May 2023

Accepted : 17 May 2023

Published: 20 Nov 2023

## 1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata berperan besar bagi ekonomi regional. Salah satu contohnya adalah kawasan wisata Kaliurang. Data dari Departemen Pariwisata DIY menunjukkan bahwa 455.029 orang mengunjungi objek wisata ini pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 852.047 orang pada 2009 (Dinpar DIY, 2010). Erupsi Merapi 2010

menurunkan jumlah kunjungan wisatawan tetapi ini tidak berlangsung lama karena setelahnya, jumlah pengunjung terus meningkat hingga mencapai 900.000an orang 2017. Pariwisata yang terus tumbuh menggerakkan beragam ekonomi lokal sehingga secara perlahan, memungkinkan masyarakat Kaliurang meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka berhasil merenovasi fasilitas rumah menjadi lebih layak, seperti memiliki kamar mandi sendiri. Selain itu, mereka juga berhasil menyekolahkan anak hingga beberapa diantaranya mencapai perguruan tinggi. Kondisi ini jauh berbeda dari masa sebelumnya Ketika mereka tergantung pada ekonomi pertanian yaitu sapi perah.

Keberhasilan ini bukanlah hasil kerja yang mudah karena secara historis, mereka senantiasa hidup di bawah bayang-bayang bencana, yang sekaligus menunjukkan resiliensi mereka. Resiliensi bukanlah barang baru bagi masyarakat pariwisata di Kaliurang. Pemukiman ini dibuka sekitar tahun 1920-an seiring dengan dibangunnya vila-vila yang dimiliki oleh orang-orang Belanda dan elit pemerintahan lokal. Turbulensi politik pada masa menjelang dan awal kemerdekaan, serta perginya para pemilik vila Belanda menghasilkan dampak yang merusak pada ekonomi lokal. Peluang ekonomi baru muncul pada tahun 1950-an ketika pemerintah mulai memberikan perhatian pada petani dengan memberi bantuan berupa bibit sapi perah. Secara perlahan, banyak rumah tangga petani mampu mengembangkan usahanya serta menginvestasikan sebagian pendapatan untuk menyekolahkan anaknya hingga lulus SMA. Harapannya, generasi penerusnya kelak dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik karena beternak sapi perah dianggapnya pekerjaan berat. Dengan kata lain, mereka memiliki orientasi kehidupan masa depan yang mempengaruhi dan menentukan tindakannya saat ini (Bryant & Knight, 2019).

Akan tetapi, upaya untuk mengembangkan usaha sapi perah menghadapi persoalan mendasar yaitu keterbatasan lahan penyedia sumber rumput. Hal ini diperparah dengan letusan Merapi pada tahun 1994 yang merusak lahan rumput di lereng gunung (Semedi, 2021). Peluang wisata yang makin terbuka menyediakan solusi alternatif bagi warga kaliurang. Sebagian mengubah kandang sapi menjadi kamar penginapan sementara sebagian lain berupaya membangun penginapan tanpa meninggalkan pemeliharaan ternak. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan lokal, diversifikasi ekonomi ini menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kaliurang. Namun pada 2010, erupsi hebat Gunung Merapi menghantam ekonomi ini sehingga dalam dua tahun setelahnya, kunjungan wisata turun drastis ke titik terendah, yakni 367.831 orang (Dinpar DIY, 2015).

Tidak dapat dipungkiri, erupsi menelan banyak korban jiwa, harta-benda, serta mengacaukan sektor pariwisata yang telah mapan. Namun pada saat yang bersamaan, bencana juga menjadi “berkah terselubung” karena kerusakan lanskap dataran hijau akibat terjangan lava menarik banyak sekali wisatawan. Dengan sangat kreatif, pelaku wisata memanfaatkan daya tarik lanskap baru ini untuk mengembangkan bisnis jip wisata lava. Tingginya minat wisatawan memungkinkan bisnis ini berkembang pesat sehingga memungkinkan banyak pelaku wisata meningkatkan skala usahanya dan pada saat bersamaan, menyerap lebih banyak pengusaha. Pada saat ini, jumlah armada jip yang beroperasi mencapai 960 yang tersebar di Kaliurang dan Cangkringan (Umaya et al., 2020). Pada 2020, usaha pariwisata yang sudah terbangun mapan ini lagi-lagi dihantam bencana yaitu Covid 19.

Jika dilihat secara historis, paparan singkat ini menggambarkan bahwa masyarakat wisata Kaliurang memiliki daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi beragam bencana. Oleh karenanya, artikel ini mengajukan satu pertanyaan krusial yaitu, relasi-relasi sosial ekonomi seperti apakah yang hidup di Kaliurang sehingga mereka mampu bertahan dan mengubah bencana menjadi kesempatan usaha serta mendapatkan kehidupan lebih baik? Pertanyaan ini

menjadi sangat relevan dengan adanya pandemi COVID-19 yang selama hampir dua tahun membatasi mobilitas sehingga menghasilkan dampak yang merusak bagi sektor pariwisata.

Di dalam studi ini, saya akan menggunakan konsep resiliensi, CBT, akumulasi dan privatisasi untuk menguraikan dinamika wisata di Kaliurang. Resiliensi pertama kali digunakan Holling untuk melihat gangguan atau guncangan pada sistem ekologi (Holling, 1973). Kemudian, konsep ini dikembangkan dan diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Diantaranya ada yang mendefinisikannya sebagai kemampuan masyarakat untuk bersiap, merespon dan pulih dari bencana, serta mengurangi dampaknya di masa depan (Lam et al., 2016; Yang et al., 2021). Resiliensi memiliki sifat kolektif dan berkaitan erat dengan bencana serta muncul melalui tiga tahapan, yakni *exposure*, *damage*, dan *recovery*. Ketiga tahapan tersebut dihubungkan melalui elemen *vulnerability* dan *adaptability* yang kemudian menghasilkan *mitigation* dan *adaptation* (Lam et al., 2016). Segala tindakan dalam menghadapi ancaman bencana baik secara individu maupun kolektif merupakan bentuk antisipasi yang terkait dengan ketidakpastian dan ancaman dari momen-momen tertentu di masa depan. Hal ini untuk mengatasi kecemasan dan mencegah atau mengubah sesuatu yang mengancam. Selain itu, antisipasi juga memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan (Bryant & Knight, 2019).

Masyarakat sendiri merupakan kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi, memiliki aturan-aturan khas, berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan mempunyai identitas yang kuat dan mengikat seluruh anggotanya (Koentjaraningrat, 2015). Masyarakat dapat dibedakan melalui kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari. Seperti yang bergerak di sektor pariwisata dapat disebut sebagai masyarakat pariwisata. Pariwisata muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya *community-based tourism –CBT–*. CBT adalah pariwisata yang muncul dari dalam masyarakat (Giampiccoli & Saayman, 2014). Penekanan utamanya terletak pada partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata (Mayaka et al., 2020). Selain itu, kuasa dan kontrol masyarakat lokal juga menjadi perhatian dalam CBT (Hiwasaki, 2006). Okazaki (2008) menyebutkan bahwa terdapat kolaborasi dan modal sosial yang menjelaskan hubungan internal dan eksternal dalam CBT. Kolaborasi menjelaskan kompleksitas pariwisata dimana beberapa aktor dari pemerintah, swasta, dan masyarakat saling terhubung atau bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama (Okazaki, 2008). Sedangkan modal sosial menggambarkan kepemilikan jaringan atau relasi antar individu maupun kelompok yang dipelihara dan dipertahankan dari waktu ke waktu (Bourdieu, 2011). Modal sosial dalam CBT tidak terlepas dari unsur kapitalisme yang bekerja di dalamnya. Hal ini terlihat dari adanya akumulasi modal untuk memperoleh dan mengembangkan usaha di sektor pariwisata.

Akumulasi dalam kapital merupakan sebuah aktivitas yang bekerja dengan berbagai cara. Bonefeld (2011) melihat akumulasi sebagai pemisahan antara pekerja dengan alat-alat produksi. Fokus utama yang dilihat adalah penguasaan alat-alat produksi (Bonefeld, 2011). Schmid (2015) melihat akumulasi sebagai perampasan –*accumulation by dispossession–* (Schmid, 2015). Pemisahan, penguasaan, dan perampasan membuktikan bahwa dalam akumulasi kapital juga terdapat privatisasi. Tujuan utama privatisasi adalah meningkatkan profitabilitas (Lombard & Morris, 2012). Dalam hal ini, Negara berperan besar pada privatisasi melalui eksklusi lahan dengan dalih memenuhi kebutuhan penduduk dan keseimbangan alam (Hall et al., 2011). Di sisi lain, Negara berupaya mengentaskan kemiskinan melalui pariwisata untuk mencapai Sustainable Development Goals –SDGs– (Gantait et al., 2021). Dengan demikian, Negara memiliki standar ganda, yakni terlibat dalam privatisasi sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berangkat dari pemikiran-pemikiran di atas, artikel ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 2. Metode

Artikel ini berisi dua atau tiga komponen besar yakni data historis-etnografis dan diskursus akademik mengenai pariwisata. Pujo Semedi bekerja mengumpulkan data historis melalui koleksi digital Perpustakaan Nasional Belanda, *delpher.nl* serta berbagai sumber arsip yang bisa diakses melalui jaringan internet. Fajar Sulistyia dibantu Agung Wicaksono bekerja menulis data etnografis di Kaliurang. Mohamad Yusuf mengumpulkan dan meramu informasi diskursus akademik mengenai pariwisata berbasis masyarakat melalui riset pustaka. Ketiga komponen ini kami satukan agar fakta historis-etnografis yang kami miliki bisa disambungkan dengan dan berkontribusi dalam pembicaraan akademik. Pemilihan lokasi studi dapat kami katakan sebagai keterpaksaan keadaan saja. Di bawah tekanan wabah COVID-19, kami kehilangan keleluasaan untuk bepergian ke tempat lain, sehingga kami memutuskan untuk melakukan penelitian di tempat tinggal sendiri serta mengakses data arsip melalui internet. Dengan demikian riset tetap dapat kami jalankan tanpa melanggar protokol kesehatan. Riset kami mulai pada awal pandemi, bulan Mei 2020 dan hingga sekitar akhir tahun 2022 saat kondisi mulai berangsur-angsur membaik dan data COVID-19 semakin melandai secara stabil. Pembahasan dalam artikel ini akan saya lakukan secara kronologis untuk menguraikan bagaimana resiliensi, cbt, dan akumulasi internal yang menyertainya berproses dari tahun 1920-an hingga saat ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Munculnya Masyarakat Pariwisata Kaliurang**

Kaliurang terletak di sisi selatan lereng Gunung Merapi dan merupakan salah satu tujuan wisata di Yogyakarta. Kegiatan wisata di Kaliurang bermula pada pertengahan dekade 1920-an ketika ekonomi Jawa kolonial mengalami peningkatan kemakmuran sehubungan dengan kuatnya permintaan pasar akan produk-produk perkebunan. Melalui izin residen Yogyakarta, wilayah Kaliurang yang semula merupakan lahan perkebunan indigo diubah menjadi kawasan peristirahatan. Para pengusaha perkebunan dan pejabat Belanda di Yogyakarta yang berminat dapat memperoleh kavling dengan status hak guna tanah Kesultanan untuk dibangun vila. Orang-orang kaya Belanda –dan juga elit Jawa– mendirikan vila di lereng gunung, bukan hanya untuk memperoleh kenyamanan dan kesejukan, tetapi juga simbol status sosial baru, sebagai kaum kaya kolonial. Pertumbuhan ekonomi dan populasi kelompok makmur di Jawa menjadikan rumah besar di kota tidak lagi sebagai penanda status sosial yang istimewa.

Kapitalisme muncul di Kaliurang melalui penyewaan lahan dan hanya bisa dilakukan oleh para elit Jawa serta orang-orang kaya Belanda. Hal ini seperti yang terjadi di pedesaan Inggris di mana para pemilik modal mampu membayar uang sewa lahan karena sistem upeti dihilangkan. Petani yang tidak mampu membayar uang sewa kehilangan lahan dan menjadi petani tak bertanah (Wood, 2002). Selain sebagai tempat tetirah, berbagai fasilitas pendukung seperti kolam renang, lapangan tenis, dan jalan dibangun sehingga Kaliurang mapan terbentuk sebagai kawasan pariwisata. Keberhasilan pariwisata di Kaliurang berjalan di atas pundak dan tetesan keringat para pengelola vila. Para pemilik vila mempekerjakan petani tak bertanah dari dusun-dusun sekitar Kaliurang –Banteng, Turgo, Pakem– dan beberapa dari luar Yogyakarta sebagai pengelola dengan berbagai peran, seperti penjaga, tukang kebun, dan juru masak. Pariwisata hadir memberikan sumber penghidupan baru bagi para petani tak bertanah yang bertransformasi menjadi pengelola vila. Tampak dipermukaan sangat jelas bahwa pariwisata berpihak pada masyarakat miskin atau yang lemah secara ekonomi untuk memperbaiki taraf hidupnya (Gantait et al., 2021). Namun, kenikmatan tersebut tidak berlangsung lama. Hidup bersama dengan gunung api aktif sama halnya dengan membuat kemungkinan-kemungkinan yang terus mencekam karena sering menerima ancaman bahaya erupsi.

Pada tanggal 18 Desember 1930, Gunung Merapi mengalami letusan hebat. Tempat tetirah

kaum makmur di Kaliurang selamat dari lahar dan awan panas karena letusan Merapi saat itu bergerak ke lereng barat daya ke arah Muntilan (Mohammad, 2022). Korban tewas mencapai 1.500 jiwa penduduk, 2.500 ternak mati hangus, dan ratusan hektar tegalan dan sawah rusak. Pada tahun 1932 rasa khawatir akan bencana Merapi masih beredar luas di seluruh wilayah lereng gunung. Namun, tidak bagi masyarakat Kaliurang. Mereka menganggap bahwa Kaliurang aman dari letusan Merapi karena dilindungi oleh Bukit Plawangan dan merupakan tempat sakral bagi Keraton Yogyakarta. Warga sangat yakin bahwa letusan Merapi tidak akan menghantam Bukit Plawangan karena bukit ini adalah bibi, adik ibu, Gunung Merapi. Sehingga mereka tidak melihat erupsi sebagai bencana atau ancaman. Berbeda dengan gejolak ekonomi pada dekade 1950-an.

Setelah Konferensi Meja Bundar 1949, Belanda meninggalkan Kaliurang dan menjual vila kepada pengusaha swasta yang memiliki uang. Mereka adalah pengusaha batik keturunan ningrat dan pengusaha perdagangan keturunan Cina yang menangkap peluang kepemilikan vila pribadi di Kaliurang. Sedangkan vila milik perusahaan diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, yang kemudian didistribusikan ke berbagai badan usaha milik negara, dinas, angkatan bersenjata dan kepolisian –Universitas Gadjah Mada salah satunya–. Merosotnya keadaan ekonomi Indonesia sejak dekade 1950-an menjadikan banyak vila terlantar, tidak terawat, banyak yang rusak disana-sini. Sementara pertumbuhan populasi yang cepat membuat kehidupan para pengurus vila semakin terbebani kebutuhan hidup yang terus naik. Dalam keadaan seperti ini bukan hal aneh jika uang sewa tamu vila sering tidak dilaporkan kepada pemilik, namun langsung digunakan pengelola dengan alasan untuk membayar biaya perawatan dan perbaikan bangunan. Menggelapkan uang sewa menjadi mode survival di kalangan penjaga vila.

Dapat dipahami bersama bahwa terbentuknya masyarakat pariwisata di Kaliurang berasal dari perluasan kapitalisme di kawasan tersebut. Para pemilik modal pada masa kolonial mempekerjakan petani tak bertanah sebagai pengelola vila –penjaga vila, tukang kebun, juru masak–. Mereka tinggal dan menetap di Kaliurang, sedangkan sebagian besar pemilik vila justru menetap di area perkotaan sehingga kontrol terhadap income dari hasil penyewaan vila sangat lemah. Hal ini dimanfaatkan masyarakat dengan menggelapkan uang sewa untuk keluar dari tekanan ekonomi pada tahun 1950-an. Selain itu, pemerintah coba membantu dengan memberikan alternatif sumber penghasilan dari sektor lain, yakni peternakan.

### **3.2. Transisi dan Privatisasi**

Pada tahun 1955, Dinas Peternakan dan Kehewanan berupaya membebaskan masyarakat dari tekanan ekonomi dengan memberikan bantuan berupa sapi perah. Penerima bantuan wajib mengembalikan dengan dua anakan betina yang kemudian diberikan kepada warga lainnya. Mereka dilatih salah seorang pegawai Dinas Peternakan dan Kehewanan untuk memelihara, membesarkan, dan memproduksi susu. Melalui cara ini, jumlah peternak semakin bertambah hingga pada tahun 1970, mayoritas warga Kaliurang berprofesi sebagai peternak dan mereka berhasil mendirikan sebuah koperasi. Koperasi ini berfungsi menampung hasil produksi yang kemudian dijual secara kolektif ke pabrik susu Sarihusada. Warga Kaliurang yang tidak memiliki kebun mencari rumput pakan ternak ke kawasan lereng gunung, dalam jarak satu hingga satu setengah jam jalan kaki dari rumah. Hutan pinus dan hutan alam di lereng Merapi mereka buka agar lantai hutan terkena sinar matahari dan rumput bisa tumbuh. Memelihara sapi perah sangat menyerap tenaga kerja. Seekor sapi memerlukan 20 kilo rumput segar per hari ditambah dengan pakan ternak yang mengandung karbohidrat dan protein. Peternak sapi perah bekerja dari jam 4 pagi hingga menjelang petang, untuk pemerah susu, membersihkan kandang, mencari rumput, memberi makan. Suami, istri dan anak yang menjelang dewasa semua bekerja. Kerja keras warga

Kaliurang dalam memelihara sapi perah berhasil meningkatkan penghasilan rumah tangga, sehingga mereka mampu membiayai pendidikan anak, melakukan perbaikan rumah.

Pekerjaan sebagai peternak diorganisir secara kolektif untuk menjaga keberlanjutannya. Kolektivitas memberikan jaminan keamanan bagi setiap anggota dan merupakan modal sosial yang digunakan untuk melepaskan diri dari tekanan ekonomi. Melaluinya, setiap anggota memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diterima setiap anggota dalam suatu kelompok merupakan dasar dari rasa solidaritas diantara mereka (Bourdieu, 2011). Dengan demikian, modal sosial memberikan ketahanan bagi masyarakat untuk *recovery* perekonomian mereka. Namun, ekonomi peternak kembali terguncang dengan terbakarnya padang rumput di lereng gunung sisi selatan akibat erupsi pada tahun 1994. Kawasan ini yang biasanya dijadikan peternak tak bertanah untuk mencari dan mengumpulkan rumput. Alhasil, satu persatu peternak meninggalkan profesinya dan mencoba peruntungan di sektor pariwisata.

Pelajaran berharga dipetik dari erupsi Merapi 1994 dimana pada erupsi-erupsi sebelumnya, warga Kaliurang tidak pernah berpikir untuk lari maupun mencari tempat berlindung. Konon, setiap erupsi dijadikan tontonan bagi sebagian warga lokal, dan yang lain memilih masuk rumah serta menutup pintu. Namun, setelah erupsi 1994, baik warga maupun Pemerintah Desa mulai meningkatkan kewaspadaan setiap terjadi erupsi. Pemerintah Desa berkolaborasi dengan BPBD –Badan Penanggulangan Bencana Daerah– dan Tim SAR –Search and Rescue– melakukan pengembangan sistem mitigasi. Persiapan barak pengungsian setiap terjadi peningkatan aktivitas dan penetapan titik kumpul evakuasi dilakukan guna meminimalisir terjadinya korban jiwa. Warga lokal sendiri mulai menyadari bahwa selama hidup di pengungsian juga membutuhkan biaya. Biaya bukan untuk memenuhi kebutuhan makan, tetapi untuk menuruti keinginan jajan anak yang tidak begitu peduli hidup di barak pengungsian. Situasi ini memaksa warga untuk menabung sebagai bekal hidup mengungsi hingga salah satu koperasi di Kaliurang memanfaatkan situasi dengan membuka jasa asuransi dengan nama asuransi erupsi. Setiap peserta wajib membayar Rp40.000,- per tahun dan merupakan warga Kaliurang yang memiliki usaha mandiri. Kucuran dana sebesar 2,5 juta rupiah mengalir bagi peserta asuransi jika harus hidup di barak pengungsian. Setelah kembali ke rumah, peserta memperoleh aliran dana asuransi sebesar 5 juta rupiah untuk memulai kembali usahanya.

Dekade 1970-an merupakan waktu perubahan besar Kaliurang dari semula tempat tetirah elit menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat. Pada zaman tempat tetirah elit, kedudukan warga setempat hanyalah sebagai pelayan dan penjaga vila yang hidupnya tergantung pada tetesan rejeki dari tuan pemilik vila. Warga mendapat kesempatan untuk hidup di atas kaki dan inisiatif mereka sendiri sebagai wirausaha yang tidak menggantungkan hidup pada relasi patronase dengan terbukanya Kaliurang untuk masyarakat umum. Kehadiran layanan angkutan umum Jogja-Kaliurang pada tahun 1970-an membuka akses masyarakat luas ke Kaliurang. Sebelumnya, Kaliurang dibungkus dengan aura elit dan mistis guna membatasi masuknya masyarakat umum ke tempat peristirahatan kaum elit tersebut. Letaknya di lereng gunung dengan satu jalur masuk tanpa layanan transportasi publik membuat tempat ini hanya mudah dikunjungi oleh mereka yang memiliki mobil sendiri ataupun cukup kaya untuk menyewa mobil. Kunjungan masyarakat kelas bawah ke Kaliurang terjadi karena adanya kepercayaan hubungan antara Raja Jogja dengan penguasa mistis Gunung Merapi dan Laut Selatan. Menjelang malam tahun baru Jawa, 1 Syuro, banyak warga Jogja yang menjalani ritual berjalan kaki dari Parangtritis hingga ke Kaliurang.

Ketangkasan warga Kaliurang menangkap peluang baru dengan membuka berbagai jasa layanan. Mereka yang memiliki modal membangun penginapan, membuka bisnis perdagangan makanan, buah dan restoran sederhana untuk meningkatkan perekonomian. Pada dekade ini

pula, semua destinasi wisata di Kaliurang tidak menarik retribusi dari wisatawan. Objek wisata Tlogo Nirmolo dan Tlogo Muncar hanya menyediakan kotak sumbangan sukarela untuk upah kebersihan, warga lokal menyebutnya *uangsapon*. Inisiatif kotak sumbangan pun tidak berasal dari pemerintah maupun dinas yang memberikan klaim bahwa objek wisata adalah teritorinya. Namun, berasal dari seorang warga lokal yang sering membersihkan kawasan wisata tersebut. Pembangunan pariwisata mulai berjalan pada awal tahun 1980-an dimana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan proyek pengembangan pariwisata di Kaliurang kepada salah satu BUMD –Badan Usaha Milik Daerah– (Perda DIY, 1981). Pengembangan yang diterapkan meliputi; Pengembangan Air Minum, Rehabilitasi Kolam Renang Tlogo Putri, Terminal Bus Tlogo Putri, Pengembangan Tempat Rekreasi Kaliurang, Pembangunan Lapangan Tenis, dan Rehabilitasi Kolam Renang Tlogo Nirmala.

BUMD tersebut membangun loket pembelian tiket tepat di samping pintu masuk Taman Bunga dan kolam renang, baik Kolam Renang Tlogo Nirmolo maupun Tlogo Putri. Setiap pengunjung wajib membeli tiket ketika hendak menikmati fasilitas yang menjadi daya tarik wisatawan. Ladang jagung di sekitar Terminal Tlogo Putri dibabat dan diubah sebagai area parkir wisatawan. Sedangkan kebun kopi yang terletak di atas ladang jagung berubah menjadi deretan kios-kios yang difungsikan untuk relokasi penjual atau pedagang. Semula para pedagang berjualan di samping area parkir Terminal Tlogo Putri dan terkena imbas dari pengembangan pariwisata. Relokasi dan pungutan biaya sewa kios bulanan dijalankan hingga kini. Dengan demikian, penarikan biaya tidak hanya berlaku pada wisatawan melalui tiket masuk tetapi juga pada warga yang memiliki bisnis dagang di kawasan wisata.

Dinamika privat yang sebelumnya berbentuk eksklusivitas Kaliurang oleh segelintir elit tertentu, kini memiliki bentuk lain. Pembukaan akses publik oleh Pemerintah melalui transportasi umum secara bersamaan mempertegas ruang privat mereka terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai kawasan wisata. Hal ini membatasi akses masyarakat Kaliurang terhadap sumber daya di sekitar mereka. Pungutan biaya sewa bulanan hanya mampu di akses oleh kalangan masyarakat yang memiliki modal, sedangkan mereka yang belum memiliki modal bertahan di sektor peternakan yang rawan terkena dampak erupsi karena lahan rumput terbakar. Terbakarnya lahan rumput menghentikan proses produksi susu yang berarti menghentikan ekonomi peternak. Di sisi lain, pemerintah melarang perburuan rumput di lereng gunung dengan dalih menjaga keselamatan peternak dari ancaman Merapi. Kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi dan wisata alam yang dikomersilkan.

### **3.3. Perkembangan Daya Tarik Wisata Kaliurang**

Terbukanya akses masyarakat menuju Kaliurang pada tahun 1970-an telah memperluas ruang ekonomi warga. Hingga saat ini jasa penyewaan vila dan penginapan masih terus berjalan baik. Pada akhir tahun 1970-an, sejumlah pemilik dan pengurus vila sepakat mendirikan perkumpulan dengan nama Paguyuban Pondok Wisata Kaliurang guna mengelola potensi wisata penginapan secara profesional, saling melindungi dari kompetisi internal yang tidak sehat dan dari tekanan luar. Pada tahun 2006, Paguyuban Pondok Wisata Kaliurang mengubah namanya menjadi Asosiasi Perhotelan Kaliurang (ASPEK). Perubahan nama dari paguyuban ke asosiasi seiring dengan meningkatnya jumlah anggota. ASPEK kini beranggotakan 303 orang yang terdiri dari pengurus dan pemilik vila serta penginapan di wilayah Kaliurang. Asosiasi ini menarik iuran anggota dan menggunakan dana antara lain untuk memberikan uang keamanan kolektif kepada polisi, sehingga pengurus vila tidak menjadi sasaran permintaan uang keamanan setiap kali ada kunjungan tamu ke vila mereka. Kendati demikian, hal ini tidak sepenuhnya dipandang sebagai sesuatu yang member manfaat. Para pengurus dan pemilik villa tidak merasa senang dengan

penarikan uang keamanan. Di balik penampakan luar sebagai tempat wisata yang sejuk dan tenang ternyata ada satu orde lain yang tidak sejuk dan tidak menenangkan yang ikut bermain dalam distribusi uang di Kaliurang, orde yang dibangun melalui pemaksaan dan ancaman.

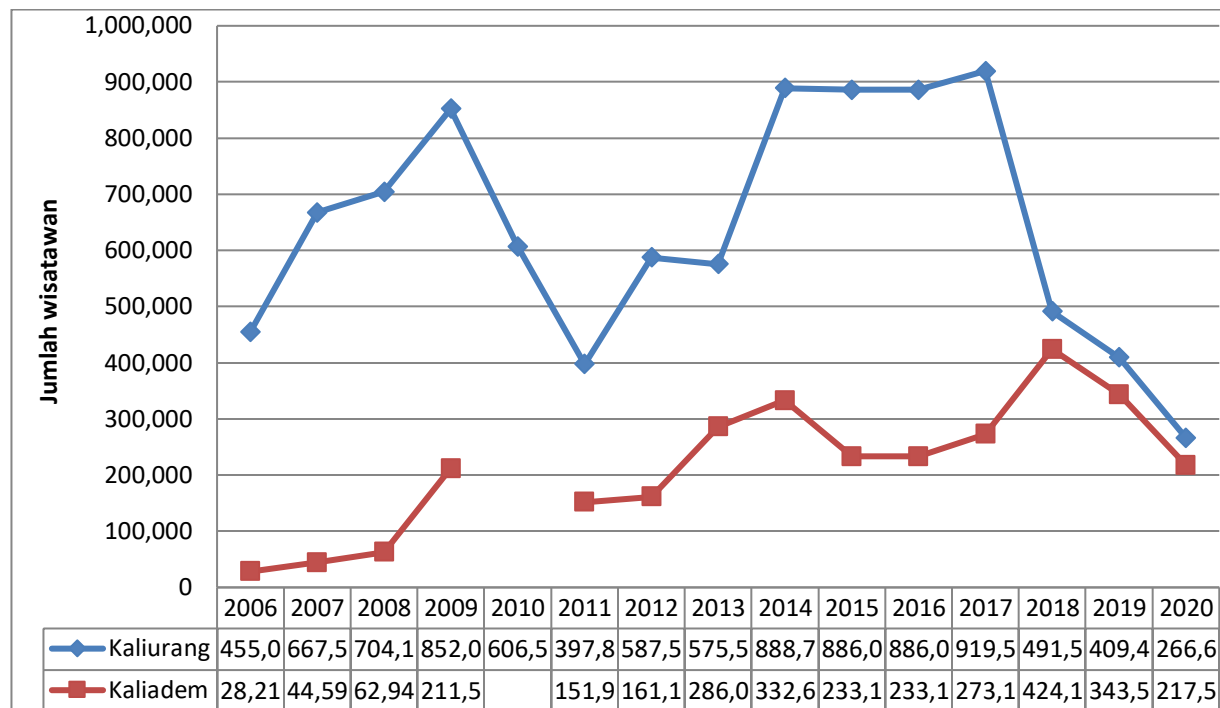
Masyarakat Kaliurang semakin menyadari adanya potensi wisata yang dapat dikembangkan dari lingkungan sekitar, terutama dari dampak erupsi Merapi 2010. Salah satunya adalah permintaan kunjungan ziarah ke rumah Mbah Marijan. Sosok Marijan begitu lekat dengan Merapi dan melegenda di banyak kalangan terutama para mahasiswa. Sehingga, saat erupsi Merapi 2010 yang menewaskannya, banyak masyarakat yang ingin mencari berkah dengan mengunjungi bekas rumahnya sekaligus menyaksikan sisa letusan erupsi Merapi 2010. Keadaan tersebut seperti gayung bersambut bagi masyarakat Kaliurang. Beberapa masyarakat muda melihat hal tersebut –terutama sisa letusan Merapi– sebagai peluang ekonomi baru: wisata lava. Dengan mengambil inspirasi wisata mobil terbuka, sejumlah warga secara kolektif membeli jip bekas dan kemudian menawarkan jasa wisata lava. Rute pertama yang dikembangkan untuk wisata jip lava ini berawal dari terminal Tlogo Putri menyebrang Kalikuning menuju Kinahrejo dan berkeliling di dusun-dusun bekas letusan Merapi. Tidak lupa, rumah Mbah Marijan juga termasuk salah satu rute yang tidak dilewatkan dalam wisata lava.

Tidak membutuhkan waktu lama, wisata jip ini memiliki perkembangan yang baik bahkan melebihi jasa penginapan yang sudah lebih dulu eksis. Menghindari persaingan internal, pemilik jip dari warga Kaliurang dan Kinahrejo membentuk sebuah komunitas yang diorganisir. Komunitas ini memiliki tugas dan fungsi pokok mengatur kepemilikan jip dan arus mobilitas jip yang berangkat mengantarkan wisatawan. Setiap anggota harus warga Kaliurang dan hanya boleh memiliki satu jip. Untuk beberapa tahun, aturan ini bisa berjalan baik. Sewa satu jip sekali berangkat adalah Rp250.000 dan pada kondisi wisatawan yang banyak, satu jip bisa beroperasi sebanyak tiga kali. Rata-rata setiap bulan seorang pengemudi jip bisa menarik penumpang sekitar 20-25 kali, dan mendapat penghasilan antara 1,7 hingga 2 juta. Pemilik jip menerima jumlah yang kurang lebih sama, sedangkan sisa pendapatan yang lain digunakan untuk iuran wisata Dusun Kinahrejo, biaya bahan bakar dan perawatan mobil. Penerimaan ini terhitung besar bagi Kaliurang dan Kinahrejo dibandingkan dengan saat mereka memelihara sapi perah. Jip wisata berhasil menarik minat pengunjung sehingga ekonomi masyarakat Kaliurang mulai meningkat. Peningkatan ekonomi adalah dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan di Kaliurang sendiri mulai terlihat meroket sejak muncul daya tarik wisata baru, yakni jip wisata (Tabel 1). Dengan demikian, pariwisata berbasis masyarakat mampu mengubah atau memperbaiki ekonomi masyarakat Kaliurang.

---

### **Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kaliurang dan Kaliadem**





(Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010-2020)

Dengan segala dinamika yang terjadi, letusan Merapi 2010 telah mengantar warga Kaliurang dan dusun sekitarnya untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat – *Communitybased-tourism/CBT*–. Kecerdikan masyarakat Kaliurang dalam melihat dan mengembangkan potensi, serta mengambil keputusan untuk membentuk komunitas jip menunjukkan bahwa keterlibatan –*involvement*–masyarakat merupakan kunci terbentuknya *CBT*(Mayaka *etal.*, 2020). Pada komunitas jip wisata, pengembangan dan pengambilan keputusan tentang daya tarik merupakan kuasa dan kontrol masyarakat sehingga terbentuk pariwisata yang tangguh. Selain itu, hal ini digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran ekonomi, atau meminimalisir larinya keuntungan ke luar Kaliurang. Keterlibatan, kuasa, dan kontrol memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat pada masyarakat adalah capaian –*outcomes*–*CBT* yang memberikan kesejahteraan serta kualitas pengalaman berwisata dari para wisatawan (Hiwasaki, 2006).

### 3.4. Pandemi Covid-19 di Kaliurang

Masyarakat Kaliurang sangat akrab dengan erupsi dan dapat hidup berdampingan bersama Merapi. Melalui proses panjang, mereka mampu memanfaatkan dampak bencana menjadi sebuah peluang usaha baru. Namun, tidak dengan wabah COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan menyerang sistem pernafasan manusia (Huang *etal.*, 2020). Kemunculannya menjadi perbincangan di tengah aktivitas masyarakat. Ini merupakan sebuah ancaman baru yang belum pernah mereka pahami sebelumnya. Tekanan wabah COVID-19 langsung terasa pada akhir Maret 2020. Setelah korban mulai berjatuhan di Indonesia, masyarakat Kaliurang berinisiatif melakukan *lockdown* lokal –menutup wilayah mereka dari kedatangan orang dari tempat lain–. *Lockdown* lokal memotong jalur penghasilan mereka secara langsung yang sepenuhnya tergantung pada kedatangan tamu dari tempat lain. Di sisi lain, bagi warga lokal yang beraktivitas di luar, harus menerima penyemprotan disinfektan setiap kali masuk gerbang retribusi untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa virus COVID-19 masuk ke Kaliurang. Hal ini merupakan kepanikan moral dimana masyarakat mulai melakukan tindakan yang irasional

(Rohloff & Wright, 2010). Terpapar COVID-19 menunjukkan bahwa virus telah bersarang di dalam tubuh korban, sedangkan penyemprotan disinfektan hanya untuk tubuh bagian luar dan berdampak buruk pada kulit seperti iritasi, kering, dan terkelupas (Zulfikri & Ashar, 2020).

Pada dua bulan pertama, April-Mei 2020, tidak ada tamu datang ke Kaliurang, namun warga masih memiliki tabungan untuk memenuhi biaya hidup. Tabungan semula berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup jika sewaktu-waktu harus tinggal di barak pengungsian karena ancaman erupsi. Pengelolaannya dilakukan oleh istri atau ibu-ibu yang dapat memastikan bahwa di tengah kondisi pandemi, mereka tetap dapat memasak dan mengkonsumsi makanan seperti kondisi normal. Sedangkan para pekerja laki-laki baik pemuda maupun bapak-bapak, merasa sumber pemasukannya menurun atau terhenti, mereka menurunkan nilai konsumsi. Mengkonsumsi rokok dengan harga yang lebih murah di tengah situasi pandemi mampu meredakan konflik dengan istri.

Namun, menjelang bulan ketiga, Juni 2020, tabungan di rumah sudah menipis dan sikap masyarakat terbelah. Kelompok yang sangat tergantung pada usaha wisata dan sudah menipis cadangan ekonominya menginginkan Kaliurang dibuka untuk wisatawan. Kelompok lain yang masih punya cadangan penghasilan –dari sedikit kebun, gaji pegawai dan sapi perah– menghendaki agar Kaliurang meneruskan *lockdown* demi keselamatan bersama. Walaupun tidak ada warga yang terpapar, penularan dari tempat lain dilihat sebagai ancaman yang nyata. Kompromi dicapai untuk membuka Kaliurang dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tamu harus mengenakan masker penutup hidung dan mulut serta tidak berkerumun. Layanan jip wisata pun dibuka dengan syarat setiap jip hanya boleh membawa tiga penumpang, bukan empat seperti saat sebelum wabah. Dengan cara ini diharapkan tidak terjadi penularan wabah dari tamu ke warga Kaliurang dan juga di antara sesama tamu. Kembali menjalankan bisnis wisata merupakan kecerdikan masyarakat Kaliurang memanfaatkan kebijakan “New Normal”. Kebijakan ini mendasari penerapan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak –3M– (Wicaksono, 2020).

Jip wisata menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang kontrol dan pengelolaannya dilakukan secara langsung oleh masyarakat Kaliurang. Berbeda dengan daya tarik wisata lain, seperti obyek wisata di kawasan Kaliurang yang kontrol dan pengelolaan berada di tangan pemerintah dan swasta. Dalam menjalankan bisnis wisata di tengah situasi wabah, masyarakat Kaliurang kemudian melihat bahwa masalah mendasar bukanlah kepatuhan pada protokol kesehatan, namun menyusutnya jumlah wisatawan. Wabah covid-19 telah menurunkan kinerja ekonomi Indonesia, penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor jasa dan industri menurun dan karenanya turun pula minat masyarakat untuk berwisata. Kaliurang yang biasanya ramai dengan pengunjung, menjadi kawasan sunyi. Terminal Tlogo Putri ditutup demikian pula kios-kios warung makanan disana. Menyusutnya jumlah pengunjung ini tercermin dari tingkat penggunaan jip wisata Komunitas Tlogo Putri, dengan anggota 55 jip anggota, pada semester kedua 2020.

**Tabel 2. Keberangkatan Jip Wisata Komunitas Tlogo Putri, Juli - Desember 2020**

Bulan	Keberangkatan	Rata-rata
Juli	292	5,3
Agustus	1.265	23,0

September	659	12,0
Oktober	1.229	22,4
November	303	5,5
Desember	642	11,7
Rata-rata	731,7	13,3

Tabel 2 menunjukkan angka rata-rata keberangkatan jip, yang semula berkisar pada angka 20-25 per bulan sebelum pandemi; turun drastis menjadi 5,3 kali pada bulan Juli dan 5,5 pada bulan November. Dengan adanya libur panjang pada bulan Agustus dan Oktober angka keberangkatan jip naik ke angka normal di atas 20 kali. Pada Desember yang biasanya merupakan salah satu musim puncak, angka keberangkatan turun ke 11,7. Pada Semester II 2020, penerimaan pengemudi dan pemilik jip Komunitas Tlogo Putri turun menjadi separuh dari angka rata-rata sebelum wabah. Perlu diingat, data ini dikumpulkan dari satu komunitas yang menempati lokasi premium pangkalan wisata lava, sepuluh komunitas lain yang tersebar di berbagai pangkalan mengalami nasib yang lebih buruk. Banyak komunitas yang tingkat keberangkatan jip anggotanya dalam semester tersebut nol atau mendekati nol. Kendaraan jip yang mereka miliki berhenti di garasi, sesekali saja dijalankan agar mesin tidak rusak.

Untuk mendapat penghasilan, sejumlah pengemudi jip di luar dusun Kaliurang beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan. Mereka mengajak rekan sesama pengemudi jip yang kehilangan sumber penghasilan. Penghasilan yang diperoleh sebagai buruh bangunan Rp80.000,- hingga Rp100.000,- per hari. Alternatif pekerjaan lain adalah dengan menambang pasir di Sungai Gendol. Deposit pasir dari letusan Merapi tahun 2010 serta kiriman banjir lahar dingin di setiap musim hujan masih tersedia dan bisa menjadi alternatif penghasilan. Biasanya empat penambang dengan alat manual dapat mengumpulkan satu truk pasir dengan harga Rp 500.000. Dalam masa sulit seperti ini, Gunung Merapi terus memberikan rezeki bagi warga. Bagi pengusaha jip Tlogo Putri yang kehilangan pekerja –pengemudi jip–, nomor keanggotaan disewakan kepada pengusaha jip komunitas lain sesama warga Kaliurang. Sewa sekali jalan tergantung kesepakatan penyewa dan yang menyewakan –pemilik nomor keanggotaan–. Di tengah kondisi wabah, rata-rata penyewa memberikan upah jalan Rp30.000,- per sekali jalan kepada pemilik nomor keanggotaan. Selain membantu pengusaha jip komunitas lain, sistem sewa juga memberikan keuntungan. Pemilik nomor keanggotaan tetap memperoleh *income* meskipun kehilangan pengemudi dan jipnya tidak beroperasi.

Penurunan penerimaan juga terjadi di kalangan pengurus vila. Semenjak wabah tidak banyak tamu yang datang tetirah di Kaliurang. Dalam catatan pengurus Vila Bunga Kencana, rata-rata penyewaan vila pada masa sebelum wabah adalah sekali per minggu, 4 - 5 kali per bulan. Pada semester II 2020, di masa wabah, angka ini turun tinggal satu kali per bulan. Penerimaan pengurus vila dari 4% komisi penerimaan tamu menyusut 75 persen, dan mereka menggantungkan diri pada honor bulanan sekitar Rp 600.000 - 1.000.000. Keadaan ekonomi pengurus vila masih terhitung aman karena masih memiliki penghasilan dibandingkan pegawai hotel. Pada bulan Mei dan Juni 2020 satu persatu pegawai hotel mengalami pemutusan hubungan kerja, dengan janji akan dipekerjakan kembali saat keadaan ekonomi pulih. Mereka mendapat pesangon satu bulan gaji, dan setelah itu tidak memiliki penghasilan lagi. Hotel tempat mereka bekerja tidak mendapat tamu dan ditutup.

Bidang lain yang mengalami penutupan adalah penjualan buah dan jajanan. Ketika terminal Tlogo Putri ditutup, para pedagang yang membuka tempat usaha di sana juga terpaksa menutup usaha. Sebagian pedagang makanan kecil di luar Tlogo Putri berusaha bertahan untuk beberapa minggu, namun dengan menghilangnya pembeli mereka kemudian juga terpaksa menutup usaha. Sementara itu sejumlah pengusaha rumah makan hingga bulan Desember masih bisa bertahan. Mereka tetap membuka usaha dengan menerapkan protokol kesehatan. Meja makan tamu ditempatkan berjarak satu dengan yang lain, dan setiap kali dipakai langsung dibersihkan dengan disinfektan. Jumlah pembeli selama semester II 2020 turun hingga 50% dari masa sebelumnya, namun demikian mereka masih bisa mendapatkan penghasilan untuk menutup biaya hidup.

Menjelang akhir tahun 2021 atau awal 2022, masyarakat pariwisata Kaliurang telah kembali pada posisi semula. Secara bertahap, buruh wisata seperti pengemudi jip dari luar mulai kembali ke Kaliurang. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah wisatawan. Selaras dengan pernyataan Ishadi Zayid bahwa jumlah wisatawan Kabupaten Sleman selama tahun 2022 adalah 7,1 juta orang. Hal ini naik 300% dari tahun sebelumnya (Radar Jogja, 2023). Kaliurang sebagai salah satu destinasi unggulan membutuhkan pekerja wisata guna melayani lonjakan wisatawan. Arus buruh pekerja wisata kembali masuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemandangan ini mencerminkan bahwa pariwisata mampu memberikan *income* yang menjanjikan bagi mereka yang terlibat didalamnya. Terlebih bagi masyarakat Kaliurang sebagai pemilik usaha jasa jip wisata yang turut berkontribusi meningkatkan atau memulihkan ekonomi pada bidang lain seperti, penjual makanan, cinderamata, dan penyewaan kamar penginapan. Dengan demikian, masyarakat Kaliurang mampu keluar dari tekanan wabah COVID-19 yang kemunculannya sempat menghentikan aktivitas pariwisata.

#### 4. Simpulan

Resiliensi suatu masyarakat tidak muncul begitu saja. Di Kaliurang, resiliensi masyarakat terbentuk melalui proses panjang. Dari era kolonial hingga pasca Kemerdekaan, mereka hidup di bawah tekanan pemilik vila. Menggelapkan uang sewa vila dilakukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, hingga muncul peluang baru di sektor peternakan. Dari beternak sapi perah inilah, ekonomi masyarakat perlahan mulai membaik sehingga mampu menyekolahkan anak hingga lulus pendidikan SMA. Membaiknya ekonomi masyarakat membuka kesempatan mereka untuk memiliki usaha sendiri di sektor pariwisata. Semula, mereka hadir sebagai hamba dari tuan kaya pemilik vila. Namun, pada tahun 1970-an, satu-persatu bangkit menjadi pemilik penginapan yang disewakan. Klaim-klaim lahan yang dijadikan sebagai daya tarik wisata menutup akses masyarakat untuk masuk ke dalam sumber daya yang tersedia. Mereka dipaksa berdiri dengan kaki mereka sendiri sehingga tercipta pengusaha mandiri di bidang penginapan. Para pemilik bisnis penginapan membentuk kelompok seperti para peternak dalam menjaga kelangsungan usaha mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk memiliki bisnis di bidang wisata, perlu memiliki modal seperti pada era kolonial dimana pariwisata hanya mampu dijangkau oleh tuan-tuan mereka –pengusaha Belanda dan elit Jawa lokal–. Selain itu, berkelompok atau kolektivitas mampu memberikan ketahanan secara sosial maupun ekonomi dari ancaman para penguasa.

Terletak di salah satu lereng gunung teraktif di dunia, Kaliurang juga menjadi kawasan yang rentan dan terancam dari ketidakstabilan aktivitas Merapi. Keberadaan ancaman dari bencana menunjukkan bahwa area ini masuk dalam fase *exposure* yang merupakan awal dari terbentuknya resiliensi (Lam et al., 2016). Arah erupsi pada tahun 1994 yang mengalir ke Sungai Boyong menghentikan aktivitas masyarakat Kaliurang, baik peternak sapi dan pengusaha wisata.

Berhentinya aktivitas masyarakat berarti berhenti roda perekonomian mereka. Dengan kata lain, telah terjadi damage atau kerusakan pada sisi ekonomi atau dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Erupsi-erupsi sebelumnya hanya bersifat sementara dan aktivitas gunung kembali pada kondisi normal. Masyarakat sekitar hanya perlu menghentikan kegiatan secara sementara dan memberikan ruang untuk Merapi. Kondisi ini menciptakan kesadaran bagi masyarakat untuk menabung sebagai mode bertahan atau bekal selama aktivitas Merapi meningkat.

Erupsi telah membentuk pola pikir masyarakat akan pentingnya menabung guna menghadapi erupsi di masa depan. Tabungan digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama masa pengungsian dan masa pasca erupsi ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Wacana menabung terbentuk dari bayang-bayang erupsi di masa depan mengingat kesadaran mereka hidup di kawasan rawan bencana yang ancaman erupsi bisa terjadi setiap saat. Dampak erupsi yang dirasakan bukan hanya ancaman korban jiwa, tetapi juga kemerosotan hingga kelumpuhan ekonomi. Mereka kehilangan sumber penghasilan, baik yang berprofesi sebagai peternak sapi perah maupun yang bergelut di bidang pariwisata. Bayangan erupsi pada masa depan membentuk pemahaman masyarakat tentang masa kini dan berhubungan dengan masa lalu yang menjadi pengalaman hidup mereka (Bryant & Knight, 2019). Di sisi lain, recovery ekonomi dari pariwisata dirasa lebih cepat dibandingkan dengan peternakan yang harus menunggu tumbuhnya ladang rumput sebagai sumber energi hewan ternak mereka. Pariwisata hanya membutuhkan kunjungan wisatawan untuk memutar roda ekonomi masyarakat lokal. Sedangkan rasa penasaran wisatawan pasca erupsi berhasil dimanfaatkan masyarakat Kaliurang untuk menciptakan bisnis usaha baru di bidang jasa jip wisata. Jip wisata muncul dari perubahan ekologi dan besarnya penasaran wisatawan pasca erupsi. Bisnis usaha ini pula yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga turut mendorong minat warga lain untuk terlibat didalamnya.

Meningkatnya minat dan jumlah warga Kaliurang dalam usaha jasa jip wisata, memaksa mereka untuk membentuk batasan-batasan guna menghentikan masuknya pemilik modal dari luar. Berkaca dari bidang peternak dan pemilik penginapan, para pemilik usaha jip wisata membentuk komunitas untuk menjaga keberlanjutan usaha dan hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kaliurang. Komunitas jip wisata mengelola dan mengembangkan usaha secara mandiri sehingga kontrol dan penguasaan berada di tangan masyarakat Kaliurang. Dengan demikian, jip wisata yang muncul sebagai daya tarik wisata baru merupakan mode pariwisata berbasis masyarakat lokal –CBT–. Baik CBT maupun resiliensi yang ditunjukkan masyarakat Kaliurang bersifat kolektif. Kolektivitas adalah modal sosial yang digunakan masyarakat dalam menghadapi pukulan wabah COVID-19 hingga mereka mampu bangkit ke kondisi semula seiring meningkatnya jumlah wisatawan. Hal ini kembali menegaskan bahwa jantung keberhasilan pariwisata terletak pada jumlah kunjungan wisatawan, dan resiliensi pariwisata di Kaliurang selama wabah COVID-19 terwujud karena mode CBT sehingga pariwisata tetap berjalan di tengah tekanan wabah. Berbeda dengan mode pariwisata lain yang masih bergantung pada pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pengembangannya. Tentu hanya keterpurukan yang tersirat di tengah tekanan wabah karena baik pemerintah maupun swasta menutup segala bentuk daya tarik wisata –obyek wisata– dari kunjungan wisatawan.

## Referensi

Bonefeld, W. (2011). Primitive Accumulation and Capitalist Accumulation: Notes on Social Constitution and Expropriation. *Science & Society*, 75(3), 379–399. <https://doi.org/10.1521/isis.2011.75.3.379>

- Bourdieu, P. (2011). The forms of capital.(1986). *Cultural Theory: An Anthology*, 1, 81–93.
- Bryant, R., & Knight, D. M. (2019). *The Anthropology of the Future* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108378277>
- Dinpar DIY. (2010). *Statistik Kepariwisataaan 2010*. Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta.
- Dinpar DIY. (2015). *Statistik Kepariwisataaan 2015*. Dinas Pariwisata Provinsi D.I Yogyakarta.
- Gantait, A., Mohanty, P., Singh, K., & Sinha, R. (2021). Pro-Poor Tourism in India: Reality or Hyperbole! *Psychology and Education*, 58(2), 9672–9682.
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2014). A conceptualisation of alternative forms of tourism in relation to community development. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(27 P3), 1667–1667.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). Introduction to powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia. *National University of Singapore Press and University of Hawaii Press*.
- Hiwasaki, L. (2006). Community-Based Tourism: A Pathway to Sustainability for Japan's Protected Areas. *Society & Natural Resources*, 19(8), 675–692. <https://doi.org/10.1080/08941920600801090>
- Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1–23.
- Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X., Cheng, Z., Yu, T., Xia, J., Wei, Y., Wu, W., Xie, X., Yin, W., Li, H., Liu, M., ... Cao, B. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *The Lancet*, 395(10223), 497–506. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30183-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30183-5)
- Koentjaraningrat. (2015). Pengantar Ilmu Antropolog. *Jakarta, Indonesia: Cetakan Kesepuluh PT Rineka Cipta*.
- Lam, N. S., Reams, M., Li, K., Li, C., & Mata, L. P. (2016). Measuring community resilience to coastal hazards along the Northern Gulf of Mexico. *Natural Hazards Review*, 17(1).
- Lombard, J. R., & Morris, J. C. (2012). Using Privatization Theory to Analyze Economic Development Projects: Promise and Performance. *Public Performance & Management Review*, 35(4), 643–659. <https://doi.org/10.2753/PMR1530-9576350404>
- Mayaka, M. A., Lacey, G., & Rogerson, C. M. (2020). Empowerment process in community-based tourism: Friend relationship perspective. *Development Southern Africa*, 37(5), 791–808. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2020.1806783>
- Mohammad, G. S. (2022). Mount Merapi in drawings and paintings; A dynamic reflection of nature, 1800-1930. *Wacana*, 23(1), 64–96.
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511–529.
- Perda DIY. (1981). *Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1981 T PENYERAHAN HASIL PROYEK-PROYEK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ARGA JASA DAN PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN NEGERI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*.
- Rohloff, A., & Wright, S. (2010). Moral Panic and Social Theory: Beyond the Heuristic. *Current Sociology*, 58(3), 403–419. <https://doi.org/10.1177/0011392110364039>

- Schmid, K. (2015). Accumulation by dispossession in tourism. *Anthropologica*, 115–125.
- Semedi, P. (2021). A Power Approach and the Coronavirus Pandemic in Yogyakarta. *Humaniora*, 33(1), 1–16.
- Umaya, R., Soekmadi, R., & Sunito, S. (2020). *Livelihood adaptation patterns of sub villages community in the slope of Merapi Volcano*. 528(1), 012020.
- Wicaksono, A. (2020). New Normal Pariwisata Yogyakarta. *Kepariwisata: Jurnal Ilmiah*, 14(03), 139–150.
- Wood, E. M. (2002). *The origin of capitalism: A longer view* (New ed.). Verso.
- Yang, E., Kim, J., Pennington-Gray, L., & Ash, K. (2021). Does tourism matter in measuring community resilience? *Annals of Tourism Research*, 89, 103222. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103222>
- Zulfikri, A., & Ashar, Y. K. (2020). Dampak Cairan Disinfektan Terhadap Kulit Tim Penyemprot Gugus Tugas Covid-19 Kota Binjai. *Menara Medika*, 3(1).

### **Unduhan internet**

<https://radarjogja.jawapos.com/sleman-bantul/2023/01/02/2022-sleman-dikunjungi-71-juta-wisatawan/>

[https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran\\_pers\\_peringatan\\_hut\\_ke\\_77\\_kemerdekaan\\_ri\\_akan\\_disemarakkan\\_berbagai\\_kegiatan\\_dengan\\_pelibatan\\_peran\\_aktif\\_masyarakat](https://www.setneg.go.id/baca/index/siaran_pers_peringatan_hut_ke_77_kemerdekaan_ri_akan_disemarakkan_berbagai_kegiatan_dengan_pelibatan_peran_aktif_masyarakat)